

# BAB I

## PENDAHULUAN

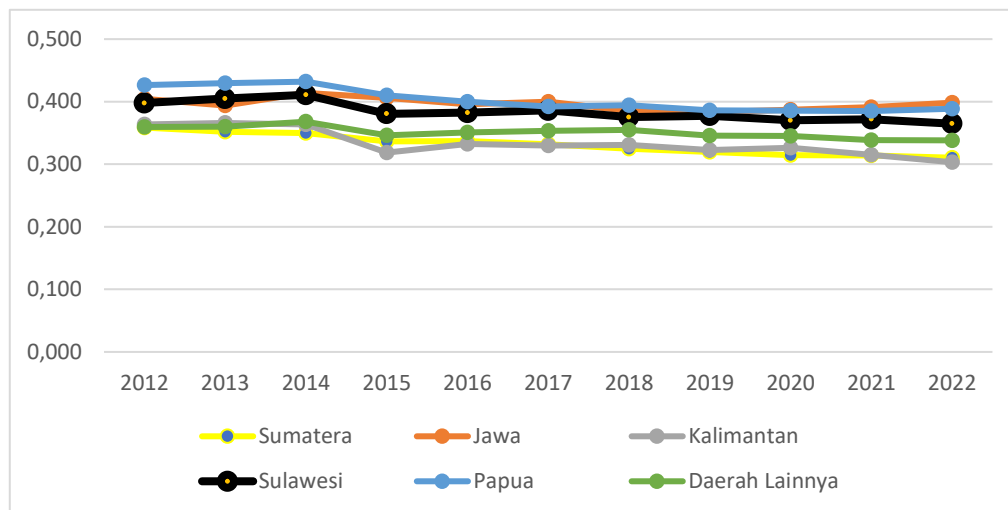
### I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, memiliki jumlah penduduk yang menjadi yang terbanyak keempat di dunia. Populasi yang besar ini memiliki konsekuensi signifikan terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi suatu negara. Dampak negatif yang muncul adalah memperparah ketidaksetaraan yang tercermin dalam meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran yang meningkat, masalah kekurangan pangan, dan sebagainya. Fenomena peningkatan ketidaksetaraan ini berkontribusi terhadap kesenjangan dalam pendapatan sosial, yang dikenal sebagai ketimpangan pendapatan (Subrata, 2018).

Menurut (Todaro & Smith, 2006) dalam (Rambey, 2018) menyampaikan penjelasan mengenai ketimpangan pendapatan akan mengakibatkan :

1. Ketimpangan pendapatan tinggi mengakibatkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan tinggi merusak stabilitas sosial dan kohesi sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, koefisien Gini penduduk Indonesia sebesar 0,384, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2022, koefisien Gini sebesar 0,403 di perkotaan dan 0,314 di pedesaan. Angka-angka ini menunjukkan ketidaksetaraan demografis yang memprihatinkan, karena pendapatan beberapa orang sangat tinggi dan pendapatan mayoritas rendah. Menurut (Dai, 2023) Ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, dan perbedaan kemampuan ekonomi antar kelompok penduduk.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

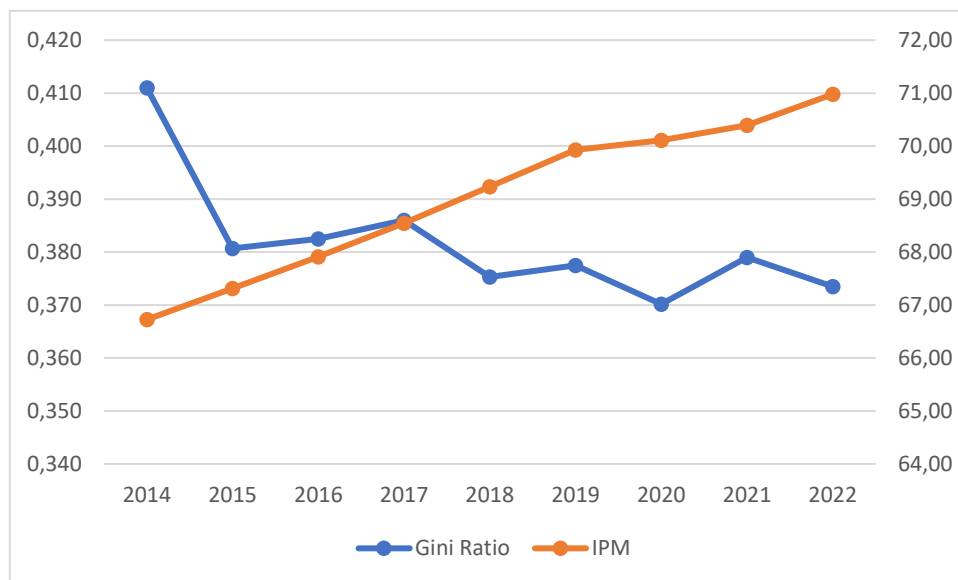
**Gambar 1. Rata-Rata Gini Ratio Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2012-2022**

Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup besar antar provinsi. Setelah Jawa dan Papua, Sulawesi menempati urutan ketiga dalam hal ketimpangan. Rasio Gini rata-rata pada tahun 2022 adalah 0,367 di Sulawesi, 0,389 di Papua, 0,399 di Jawa, 0,311 di Sumatera, 0,303 di Kalimantan, dan 0,338 di daerah lainnya seperti Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang ekstrim yang terjadi hampir di seluruh provinsi di Sulawesi.

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Tren demografis, lingkungan, politik dan budaya adalah contoh dampak non-ekonomi. Pada saat yang sama, situasi ekonomi makro di wilayah ini sering dikaitkan dengan masalah yang mengarah pada ketimpangan pendapatan. (Dian, 2019). Indikator makroekonomi yang dapat mempengaruhi tersebut salah satunya IPM, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yoertiara & et al., 2022) tentang Dampak IPM, pengangguran terbuka, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa mengemukakan terdapat pengaruh variabel terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.

IPM merupakan indikator penting kemajuan pembangunan di daerah, termasuk Sulawesi. Semua negara, terutama Indonesia, berusaha untuk mencapai

manfaat sosial, sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan standar hidup warga negara menjadi salah satu misi dalam pembangunan ekonomi. Dengan memperluas kesempatan kerja di semua wilayah, termasuk Sulawesi, distribusi pendapatan merupakan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

### Gambar 2. Perbandingan IPM dengan Ketimpangan Pendapatan Sulawesi

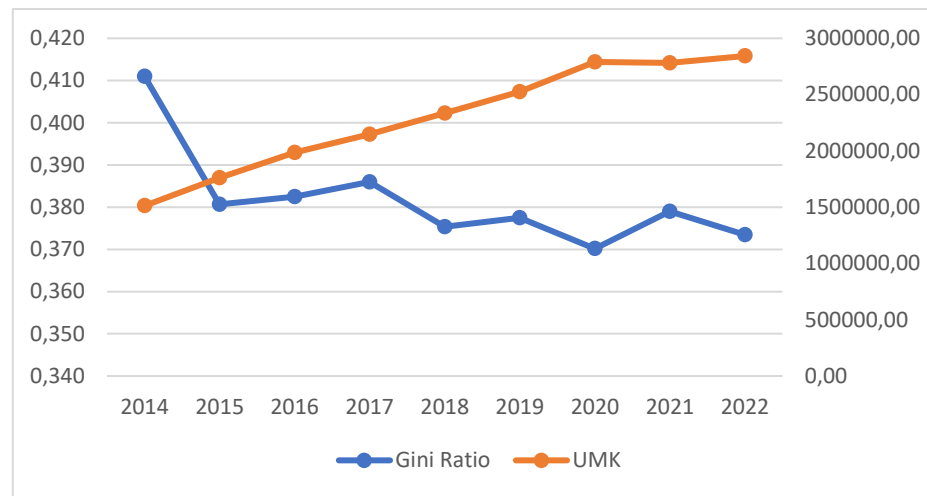
Pada data Gambar 2. di atas menunjukkan total dengan tingkat ketimpangan pendapatan pada Pulau Sulawesi yang bergerak fluktuatif. Fenomena terjadi pada tahun 2019 terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan hal tersebut disebabkan akibat ketidaksetaraan tingkat pendidikan. Sebagian besar penduduk Sulawesi tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan, maka mereka mungkin tidak dapat mengakses pekerjaan yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi (Senong, 2019). Keadaan tersebut tidak sejalan dengan kenaikan IPM, yang disebabkan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, penurunan angka kematian anak, peningkatan harapan hidup,

dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum di Sulawesi, hal tersebut dapat berdampak pada kenaikan IPM. Selain itu kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dapat meningkat dengan kesehatan yang lebih baik (Noor, 2020).

Kemudian pada tahun 2021 dimana terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 0.379 yang bertolak belakang dengan kenaikan IPM pada sebesar 70,11. Akibat pandemi COVID-19, sebanyak 65% masyarakat Sulawesi mengaku penghasilannya berkurang akibat pandemi COVID-19. (Wicaksono, 2020).

Menurut (Astungoro, 2021) IPM telah meningkat karena peningkatan semua dimensi yang didukung. Harapan hidup yang tinggi, terutama pendidikan dan harapan hidup. Harapan hidup meningkat sebesar 0,14% tahun-ke-tahun. Sementara itu, sedangkan harapan lama pendidikan 0,71%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2021) menyebutkan upah minimum berdampak pada distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Bali.

Upah minimum menentukan besaran yang diperoleh seorang karyawan. Upah minimum adalah upah yang harus dibayarkan oleh semua pemberi kerja kepada pekerja yang bekerja di bawah standar upah minimum yang diatur oleh pemerintah. Ini bervariasi dari tahun ke tahun tergantung pada tujuan penetapan upah minimum, yaitu: Menekankan pentingnya dan peran pekerja/karyawan, Melindungi pekerja dari skema upah sangat rendah yang sangat tidak memuaskan, Mendukung kesempatan untuk menerima upah yang sepadan dengan prestasi yang dihasilkan pekerja, Berusaha bekerja dengan tenang dan damai di perusahaan, Upaya peningkatan taraf hidup.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

### Gambar 3. Perbandingan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan Sulawesi

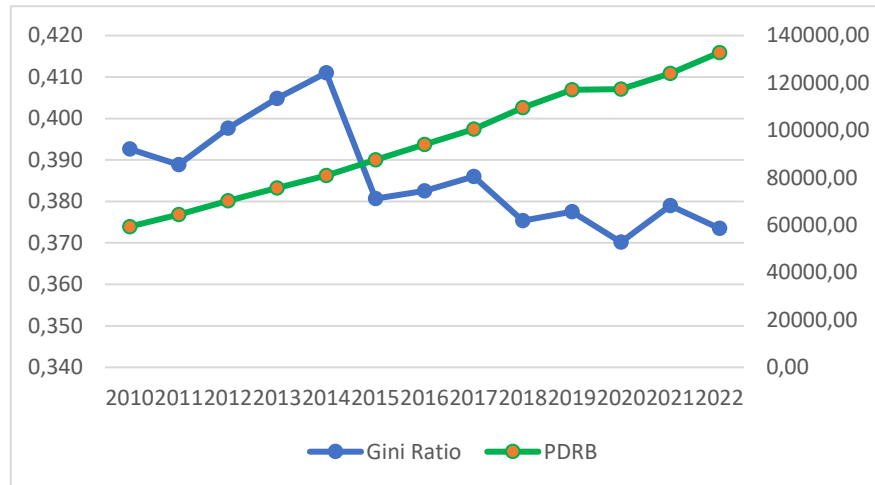
Gambar 3 menunjukkan ketimpangan upah minimum dan pendapatan di Sulawesi. Dimana upah minimum meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk untuk hidup layak di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi pada tahun 2017 tidak merata, terdapat sektor di daerah lain yang terjadi peningkatan lebih tinggi daripada di daerah yang lain, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini dapat terjadi jika sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segmen penduduk atau wilayah tertentu, sementara sebagian besar penduduk atau wilayah lainnya tidak merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan (Syarifudin, 2017). Terdapat peningkatan di beberapa daerah menjadi tolak ukur pemerintah dalam menetapkan kenaikan upah minimum sebagai respons untuk memastikan bahwa buruh mendapatkan bagian yang adil dari kemakmuran ekonomi yang tercapai (Sukarno, 2017).

Ketimpangan teori pada tahun 2019 di mana terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 0,58% yang bertolak belakang dengan kenaikan pada upah minimum sebesar 8,11%. Formula untuk pertumbuhan upah minimum adalah tingkat pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Peningkatan ketimpangan

pendapatan adalah hasil dari penurunan bertahap dalam tingkat kemiskinan. Hanya orang kaya yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi. Jika ketimpangan pendapatan dapat dikurangi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini tentu akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. (Kementerian Keuangan, 2019).

Menurut (Fernando, 2021) Ada hubungan sebab akibat antara arah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu dan daerah tertentu. Pembangunan adalah proses yang sepenuhnya reflektif dan komprehensif yang mempengaruhi aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, Di negara-negara berkembang, pembangunan adalah tentang menyeimbangkan pemerataan dan pertumbuhan, dengan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan yang paling berharga. (Lestari & Putri, 2021)

Pertumbuhan dan struktur ekonomi serta pengurangan ketimpangan pendapatan antara kelompok penduduk, wilayah dan sektor dapat menjadi ukuran pembangunan. PDRB sebagai ukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan tentunya memiliki perbedaan antar daerah. Terdapat daerah yang memiliki ekspansi yang signifikan, sementara beberapa daerah tumbuh lambat. Perbedaan ini akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah, yang pada gilirannya akan berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

**Gambar 4. Perbandingan PDRB dengan Ketimpangan Pendapatan Sulawesi**

Data dari Gambar 4. Menunjukkan tingkat pertumbuhan PDRB dan ketimpangan pendapatan pada Pulau Sulawesi. Jika PDRB meningkat, hal ini dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan jika kenaikan pendapatan tersebut dibagikan secara merata ke seluruh penduduk. Namun, jika kenaikan pendapatan hanya didapat oleh segelintir orang saja, maka ketimpangan pendapatan justru akan semakin buruk. Pada Tahun 2021 di mana terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 2,39% yang sejalan dengan kenaikan pada PDRB sebesar 5,67%. Kenaikan PDRB ini terjadi pada semua provinsi di pulau Sulawesi dengan provinsi yang paling signifikan yaitu Sulawesi Tengah sebesar 11,70%.

Penelitian sebelumnya oleh (Susanti & Arsyad, 2021) mengevaluasi pengaruh IPM, upah minimum, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi-Provinsi di Indonesia, termasuk di Pulau Sulawesi. Temuan penelitian tersebut mengemukakan keseluruhan dari variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sulawesi dan di seluruh Indonesia. Namun, penelitian tersebut hanya memberikan gambaran umum dan belum mengkaji pengaruh variabel-variabel tersebut secara spesifik di setiap provinsi di Sulawesi. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini akan mengkaji secara spesifik pengaruh IPM, upah minimum, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada

provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Sulawesi.

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh IPM, upah minimum, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi hanya terbatas pada periode tertentu dan belum mencakup periode terbaru. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh IPM, upah minimum, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Sulawesi selama periode 2010-2022. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi lebih akurat dan terkini bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan posisi ketimpangan pendapatan Sulawesi sebesar 0,365 yaitu berada pada urutan ketiga setelah Jawa dan Papua dengan ketimpangan pendapatan sebesar 0,399 dan 0,389. Tingginya tingkat ketimpangan di Sulawesi ini menjadi landasan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi, khususnya indikator makroekonomi dan sosial seperti IPM, Upah Minimum, dan PDRB. Tingkat ketimpangan pendapatan di Sulawesi masih cukup tinggi. Didasari penjelasan di atas, didapatkan perumusan masalah yakni adalah:

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Sulawesi?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Sulawesi?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Sulawesi?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan dalam penelitian ini diantaranya:



1. Mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Sulawesi.
2. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Sulawesi.
3. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Sulawesi.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi bagi pemerintah dan masyarakat di Provinsi-Provinsi Sulawesi dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian ini berguna sebagai landasan dalam mengembangkan penelitian serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Peneliti tentunya dapat mengembangkan teori yang di dapat semasa perkuliahan terutama yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan di pulau Sulawesi.

###### b. Bagi Pemerintah

Peneliti mengharapkan dengan adanya temuan pada penelitian ini sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk Pemerintah Pulau Sulawesi dalam meminimalisir ketimpangan yang terdapat di Pulau Sulawesi.

###### c. Bagi Masyarakat

Penelitian tentang ketimpangan pendapatan di pulau Sulawesi ini dapat dijadikan wawasan, dan informasi baru untuk melengkapi penelitian yang dilakukan peneliti selanjutnya. Selain itu menjadi sumber kepustakaan dan pengetahuan.